WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2025

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2021

Iftitah Sokya ¹⁾; Rezki Zurriah ^{2*)}

- 1). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: iftitahsokya000@gmail.com
- 2). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: rezkizurriah@umsu.ac.id

*Corresponding email: rezkizurriah@umsu.ac.id

Abstract

This research discusses the fiscal reconciliation analysis of PT Kartika Hijau Lestari's commercial financial reports in determining corporate income tax based on Law no. 7 of 2021. The aim of this research is to determine the suitability of PT Kartika Hijau Lestari's fiscal reconciliation with Law no. 7 of 2021. The types of data used are primary data and secondary data. Data was collected through interview and documentation techniques. The data that has been obtained is then analyzed using descriptive analysis methods. The results of this research indicate that the implementation of fiscal reconciliation at PT Kartika Hijau Lestari is not in accordance with Law no. 7 of 2021.

Keyword: *Commercial financial reports, fiscal reconciliation, fiscal financial reports, corporate income tax*

PENDAHULUAN

Dana dibutuhkan oleh setiap negara dalam menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintahan untuk kegiatan yang bersifat rutin maupun untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan suatu negara. Pajak dinyatakan sebagai iuran wajib setiap warga negara kepada kas negara yang di atur berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapersi) secara langsung dapat diunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum suatu negara (Resmi, 2019). Fungsi pajak dapat digolongkan sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Hanum, 2023). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, dimana salah satunya adalah Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) yang merupakan jenis pajak atas penghasilan atau laba usaha yang diperoleh dalam satu tahun pajak, dibebankan kepada wajib pajak badan baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Pada umumnya penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan merupakan bagian dari komunikasi bisnis (Rudianto, 2022), yang mana laporan tersebut menggambarkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan informasi tersebut menerangkan dari mana asal sumber daya tersebut diperoleh atau didapatkan perusahaan (Agoes & Trisnawati, 2020). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK sering kali menghasilkan nilai laba yang berbeda dengan laba menurut fiskal (Sanjaya & Pratama, 2022). Laporan keuangan yang disusun menggunakan ketentuan fiskal memiliki batasan – batasan dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Laporan fiskal disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan (Saputro & Herawati, 2023). Laporan keuangan fiskal dapat disajikan dengan melakukan beberapa penyesuaian atau sering disebut sebagai rekonsiliasi

fiskal atas laporan keuangan komersil, perbedaan tersebut timbul karena dasar yang digunakan berbeda. Laba yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK dinyatakan sebagai laba menurut komersial sedangkan laba yang ditentukan berdasarkan undang – undang perpajakan dinyatakan sebagai laba menurut fiskal, sehingga terdapat perbedaan dalam pengukuran serta pengakuan terhadap komponen pendapatan dan biaya perusahaan (Ramadhanti A & Dewi, 2023).

Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan harus dihitung berdasarkan nilai laba fiskal yang mengacu pada ketentuan undang-undang perpajakan. Untuk menjembatani adanya perbedaan kepentingan komersial dan kepentingan fiskal maka perusahaan tidak perlu menyelenggarakan pembukuan ganda, perusahaan dapat menyelenggarakan satu pembukuan berdasarkan PSAK kemudian menyusun rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui nilai laba fiskal yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal adalah serangkaian proses yang diperlukan dalam menyesuaikan ketentuan fiskal yang berbeda dengan laba komersial sehingga dapat dihasilkan ketentuan pajak yang sesuai dengan penghasilan neto atau laba yang diperoleh (Mulyono, Pratama, & Estrini, 2023). Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial) wajib melakukan rekonsiliasi fiskal agar perhitungan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Koreksi positif dan koreksi negatif atas laporan keuangan komersial dapat timbul karena diakibatkan oleh rekonsiliasi fiskal. Koreksi positif adalah penyesuaian pada pendapatan dan biaya yang mengakibatkan laba perusahaan atau penghasilan kena pajak meningkat sehingga pajak penghasilan yang terutang juga ikut meningkat sedangkan koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan dan biaya yang berdampak pada penurunan laba atau penghasilan kena pajak sehingga pajak penghasilan yang terutang juga menurun. Perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu merupakan pengelompokan dari perbedaan antara penghasilan dan biaya berdasarkan akuntansi dan fiskal (Saleh, Hendrich, Vegirawati, & Umayana, 2023). Dengan diselenggarakannya proses rekonsiliasi fiskal oleh perusahaan maka pajak yang disetorkan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 merupakan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini sejak tanggal 1 januari 2022. Aturan ini merupakan perubahan kelima atas undang-undang perpajakan. Pentingnya peran pajak dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara menyebabkan prosedur dan sistem perpajakan yang ada selalu disempurnakan dan disederhanakan maka dengan itu pemerintah Indonesia berusaha memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan dimana Indonesia dapat melakukan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sehingga perpajakan dapat tetap memberikan sumbangsuhnya secara maksimal terhadap penerimaan negara (Tanjung & Hanum, 2023). PT Kartika Hijau Lestari merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dijadikan sebagai pedoman perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Oleh karena itu, perusahaan menyusun rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui nilai laba fiskal berdasarkan Undang-undang perpajakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Berikut ini merupakan perbandingan perhitungan rekonsiliasi fiskal menurut PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 dengan rekonsiliasi fiskal yang seharusnya menurut UU No. 7 Tahun 2021.

Tabel 1.1 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal

	Menurut Perusahaan	Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021
Laba neto	897.837.896	897.837.896

komersial		
Koreksi positif	247.424.520	219.756.120
Koreksi negatif	604.200	604.200
Laba neto fiskal	1.144.658.216	1.116.989.816
Selisih laba fiskal	27.668.400	

Sumber: Rekonsiliasi Fiskal PT Kartika Hijau Lestari. 2024

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas dapat diketahui bahwasanya rekonsiliasi fiskal yang telah disusun oleh PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 menghasilkan koreksi positif sebesar Rp 247.424.520. Namun jumlah koreksi positif terhadap laba perusahaan tersebut bukan merupakan jumlah yang tepat, setelah dilakukan analisis terhadap kertas kerja rekonsiliasi perusahaan diketahui bahwa terdapat komponen biaya yang seharusnya tidak perlu dikoreksi fiskal karena biaya itu dijadikan sebagai pengurangan untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terhutang. Dengan adanya Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 telah membuka paradigma baru bagi wajib pajak dimana merujuk pada peraturan perpajakan yang terbaru yaitu pasal 6 ayat (1) huruf n undang – undang HPP Nomor 7 tahun 2021 sehubungan dengan biaya pengganti (imbalan) yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan termasuk sebagai *deductable expense* sehingga dapat diakui sebagai pengurang/biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan adanya kesalahan dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal tersebut maka jumlah laba neto fiskal perusahaan menjadi lebih besar Rp 27.668.400 daripada jumlah yang seharusnya. Hal ini nantinya akan mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya karena koreksi positif mengakibatkan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak yang pada akhirnya meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Dalam menyelesaikan penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif berupa laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi fiskal PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai metode diantaranya wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini masalah dikhususkan dalam masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu sehingga dilakukan penelitian dengan menggunakan studi kasus pada suatu perusahaan yaitu pada PT Kartika Hijau Lestari untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai subjek tertentu. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menggambarkan keadaan dimana laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi (SAK) dan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dengan cara mempelajari dan menganalisis implementasi teori – teori yang ada pada Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 apakah sudah sesuai dengan fakta yang tepat di PT Kartika Hijau Lestari yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Kartika Hijau Lestari adalah perusahaan yang mana perusahaan ini tidak mempunyai akuntabilitas publik secara signifikan, saham – saham yang diterbitkan tidak diperjualbelikan kepada publik melalui bursa efek. Oleh karena itu perusahaan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam pencatatan akuntansi dan pelaporannya.

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha untuk menyesuaikan antara perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK dengan perbedaan yang ada dalam laporan

keuangan fiskal yang dibuat berdasarkan ketentuan undang – undang perpajakan. Rekonsiliasi fiskal yang dihitung serta disusun oleh PT Kartika Hijau Lestari belum sesuai sepenuhnya dengan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dimana biaya – biaya dalam laporan laba rugi PT Kartika Hijau Lestari yang terdiri dari biaya pengobatan staff kantor, biaya pengobatan bagian keamanan dan biaya *extra fooding* bagian keamanan tidak seharusnya dikoreksi positif oleh perusahaan. Karena biaya – biaya tersebut termasuk sebagai biaya naturan dan/atau kenikmatan yang boleh dikurangkan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan, hal ini mengacu pada peraturan perpajakan yang terbaru yaitu Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Perlakuan atas biaya natura dan/atau kenikmatan yang dikoreksi positif oleh perusahaan akan menyebabkan semakin tingginya laba neto fiskal perusahaan (penghasilan kena pajak) sehingga PPh badan yang terhutang akan lebih besar jumlahnya dari pada jumlah yang sebenarnya dengan selisih sebesar Rp 4.847.861.

Berdasarkan hasil perhitungan rekonsiliasi fiskal dapat diketahui bahwa jumlah laba fiskal perusahaan yaitu sebesar Rp 1.116.989.816 dengan jumlah peredaran bruto sebesar 11.789.11.339 sehingga besarnya PPh Badan yang terhutang pada tahun pajak 2023 bagi perusahaan sebesar Rp 195.711.039. nilai tersebut merupakan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan pada tahun berikutnya dengan cara diangsur (PPh Pasal 25) sehingga apabila perusahaan menghitung rekonsiliasi fiskal sesuai dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 maka perusahaan dapat menghemat pengeluarannya untuk membayar pajak sejumlah Rp 4.847.861 yang merupakan selisih dari jumlah pajak terhutang yang dihitung menurut perusahaan.

Berdasarkan perhitungan kembali PPh kurang/lebih bayar, diketahui bahwa PPh kurang bayar PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 sebesar Rp 134.026.163. Jumlah tersebut memiliki selisih sebesar Rp 4.847.861 dari jumlah PPh kurang bayar yang telah dihitung oleh perusahaan. Hal ini berarti apabila dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan tidak mengacu pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, maka perusahaan akan membayar PPh lebih besar sejumlah Rp 4.847.861 dari jumlah yang seharusnya. Hal ini tentunya merupakan kerugian bagi perusahaan karena akan mengakibatkan semakin meningkatnya pengeluaran perusahaan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dibuat dan disusun PT Kartika Hijau Lestari belum sesuai sepenuhnya dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Dalam laporan laba ruginya terdapat beberapa biaya – biaya yang tidak seharusnya dikoreksi positif oleh perusahaan. Perusahaan masih belum konsisten dalam penyajian laporan keuangannya yang mengadopsi SAK ETAP sebagai pedoman pelaporan keuangan namun menggunakan peraturan perpajakan untuk pengelompokan dan penyusutan asset tetap.

REFERENSI

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2020). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2023). *Perpajakan : Teori Dan Kebijakan*. Perdana Publishing.
- Louis, P. H. W. (2021). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Thermoplast Indo. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3).
- Mulyono, A., Pratama, R. Y., & Estrini, D. H. (2023). REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL KE LAPORAN KEUANGAN FISKAL. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 4(2), 1–8.
- Ramadhanti A, F. S., & Dewi, S. R. (2023). Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT. DCN Indonesia. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(5), 1–15.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2022). *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Erlangga.

- Saleh, R., Hendrich, M., Vegirawati, T., & Umayana, A. (2023). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Rajawali Buana, Tbk Periode Tahun 2021. *Jurnal Sustainability Riset Akuntansi*, 1(2).
- Sanjaya, S., & Pratama, M. R. (2022). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Mopoli Raya. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3(2), 357–362.
- Saputro, P., & Herawati, I. D. (2023). Analisis Pengaruh Korelasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan Terutang pada PT. Hardjono Patra Jaya. *Jurnal Imiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(2).
- Tanjung, S. H., & Hanum, Z. (2023). Analysis of Tax Planning Implementation of Corporate Income Tax in PT. Its Back to Nature. *Proceeding Medan Internasional Conference Economics And Business*, 1.